



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Setriliun untuk Banjir Setahun

Sebagian besar anggaran untuk pembebasan lahan. Sisanya untuk penggarapan waduk dan naturalisasi sungai.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp 1 triliun untuk program penanggulangan banjir tahun depan. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juaini Yusuf, mengatakan bujet itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan sejumlah waduk yang mangkrak, pembebasan lahan di bantaran sungai, dan pengerukan guna memperdalam sungai dan waduk. Mereka juga akan membeli ekskavator dan alat berat lain untuk mendukung kerja mereka.

Sebagian besar dari pos anggaran itu dialokasikan untuk pembelian tanah bantaran sungai sebesar Rp 600 miliar. "Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini," kata Juaini, kemarin.

Program kerja Dinas Sumber Daya Air terbentur defisit anggaran. Pendapatan DKI ada yang belum disetorkan, yaitu dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun. Akibatnya, anggaran perangkat daerah tersebut dipangkas Rp 500 miliar dari total alokasi Rp 850 miliar. Sedianya, pos pembiayaan itu untuk pembebasan lahan guna pengendalian banjir. "Jadi, anggaran kami yang terserap tahun ini hanya Rp 350 miliar," ujar Juaini.

Dengan anggaran normal tahun depan, Dinas Sumber Daya Air akan melanjutkan penggarapan waduk, termasuk pembebasan lahan di sekitarnya. Dari Waduk Marunda, Jakarta Utara; embung di Kamal, Jakarta

Barat; sampai Waduk Brigif, Waduk Lebak Bulus, dan Situ Babakan, Jakarta Selatan.

Naturalisasi sungai juga akan dilaksanakan tahun depan. Gubernur Anies Baswedan menggadagadag konsep revitalisasi dengan penempatan batu kali ini lebih manjur menahan luapan air ketimbang penanaman beton berdasarkan metode normalisasi. Terdapat lima lokasi proyek naturalisasi, yaitu Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama, Waduk Sunter Selatan, Waduk Kampung Rambutan, dan Waduk Cimanggis. "Anggarannya Rp 288,49 miliar,"

kata Juaini. Sedangkan di pesisir, dinas akan membangun tanggul, pintu air, dan saluran air tambahan untuk membendung rob.

Gubernur Anies membantah tuduhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pemerintah DKI tidak serius menjalankan penanggulangan banjir, seperti yang dilontarkan Ketua Komisi Pembangunan DPRD, Ida Mahmudah. Menurut Anies, antisipasi banjir terus dilakukan lewat pengerukan waduk dan sungai, serta membangun sumur resapan. Sumur resapan tidak hanya menyerap air saat musim hujan, tapi juga

menyimpan cadangan air di musim kering. "Insya Allah kita aman," katanya.

Dinas Sumber Daya Air mengusulkan Rp 3,9 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020. Bujet tersebut untuk berbagai program yang akan dijalankan tahun depan, termasuk penanggulangan banjir, yang menjadi program prioritas pemerintah DKI. ●

Garap Sana, Keruk Sini

DINAS Sumber Daya Air DKI Jakarta mengusulkan sekitar Rp 1 triliun untuk penanggulangan banjir tahun depan. Sebanyak Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi sungai yang sempat tertunda tahun ini.

